

NASKAH AKADEMIK PROGRAM STUDI S-1 PERPAJAKAN



Disusun Oleh :

Dr. Agus Santosa, M.M.
Drs. Jasrial, M.Si.
Drs. Syarif Fadillah, M.Si.
Syafiqoh Nurhayati, S.E.Sy., M.A.
Dedy Juniadi, S.Kom, M.A.
Dr. Muhtarom, S.E., M.M.
Ridha Azka Raga, S.E., M.Ak.
Jufri Yandes, S.A.B., M.Si.
Husna Putri Pertiwi, S.S.T., M.B.A.
Destiana, S.A.B., M.A.B.

FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TERBUKA

2023

Abstrak

Program Studi S1 Perpajakan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) UT ditawarkan atas dasar kebutuhan pasar. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perpajakan yang dapat mendukung upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya masih sangat kurang. Kebutuhan yang tinggi di bidang perpajakan, belum diimbangi dengan ketersediaan SDM bidang perpajakan. Jika di lihat jumlah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program perpajakan, hanya sekitar 4 Perguruan Tinggi. Rata-rata mereka memiliki mahasiswa program perpajakan jenjang D-1 sampai D-4/S-1, kurang dari 1000 mahasiswa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena peneliti ingin mengetahui potensi pasar bidang perpajakan secara menyeluruh dan komplek. Untuk mendapatkan data yang diperlukan, peneliti melakukan survai awal kepada 521 responden tentang minat masyarakat terhadap Prodi S1 Perpajakan UT, dilanjutkan dengan melakukan studi banding ke beberapa perguruan tinggi yang memiliki Program Studi S1 atau D4 Perpajakan atau Fiskal, dan studi dokumentasi.

Hasilnya menunjukkan bahwa 53 persen dari responden mengatakan bahwa Prodi S1 Perpajakan dipilih karena sesuai dengan pekerjaannya saat ini. Kemudian 80,8 persen memilih kuliah di UT karena waktunya dapat fleksibel, sehingga tidak mengganggu mereka untuk tetap bekerja.

Sedangkan potensi pasar yang ada, dari Lembaga pemerintah, estimasinya sekitar 1.204 orang; dan dari Lembaga BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta lainnya, estimasinya sekitar 59.848 orang.

Kata kunci: Prodi S1 Perpajakan, Potensi pasar.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk meningkatkan belanja negara, diperlukan penerimaan negara yang cukup besar guna membiayai pengeluaran belanja negara. Sampai saat ini, penerimaan negara dari sektor pajak masih sangat dominan. Hal ini dapat dilihat dari data berikut:

Tabel 1. Laporan Pendapatan Negara Tahun 2018 – 2022

URAIAN	TH 2018 (T)	TH 2019 (T)	TH 2020 (T)	TH 2021 (T)	TH 2022 (T)
Pendapatan	1.539,72	1.556,13	1.315.25	1.628.52	1.846,14*
Belanja	39.900	39.546	62.083	89.957	2.716,1*
Penerimaan dari Pajak	1.518,72	1.546,13	1.285.14	1.547,86	-
Pertumbuhan penerimaan dari pajak	5,8 persen	5,2 persen	(16,78) persen	20,37 persen	-

Sumber: kemenkeu.go.id

*berdasarkan APBN 2022

Data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar dari pendapatan negara, berasal dari penerimaan pajak. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pajak merupakan “amunisi utama” pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh kemampuan pemerintah menghimpun penerimaan dari pajak, yang kemudian digunakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Untuk dapat memenuhi target penerimaan dari sektor perpajakan, pemerintah juga telah membuat kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan. Kebijakan yang terus digalakkan sampai saat ini antara lain:

- Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi dunia usaha, stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat
- Peningkatan pelayanan dan kepatuhan wajib pajak dengan didukung perbaikan regulasi, administrasi serta akuntabilitas
- Penggunaan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) untuk meningkatkan basis pajak dan mencegah praktik penghindaran pajak dan erosi perpajakan. Kebijakan ini menuntut kepada seluruh wajib pajak untuk lebih memahami tentang kewajiban membayar pajaknya secara benar. Hal ini berarti akan dibutuhkan tenaga perpajakan di setiap perusahaan yang memiliki kewajiban untuk menghitung secara benar besarnya pajak yang harus dibayar.
- Meningkatkan pelayanan dan efektifitas organisasi
- Membangun kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak, melalui kemudahan-kemudahan membayar pajak, misalnya *e-service*, *mobile tax unit*, KPP Mikro dan *Outbond call*.
- Perbaikan kemudahan dan percepatan pelayanan di pelabuhan dan bandara, serta mencegah pemberantasan penyelundupan. Hal ini tentu saja membutuhkan jumlah SDM penarik pajak yang cukup dan mempunyai kualitas serta integritas yang baik.

Sementara itu, jumlah Wajib Pajak (WP) berdasarkan data tahun 2022 berjumlah 19 juta, yang terdiri dari WP Badan berjumlah 1,65 juta; dan WP Orang Pribadi berjumlah 17,35 juta. Sedangkan pihak yang bertanggung jawab terhadap penarikan pajak, yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI hanya memiliki 500 unit Kantor Pelayanan, dengan jumlah pegawai sekitar 42 ribu orang. Dari 42 ribu orang pegawai DJP, yang bertugas sebagai *Account Representative* (AR) sebanyak 10.722 orang. (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220614123615-4-346915/pegawai-pajak-berkurang-600-orang-resign>).

Jumlah tersebut masih sangat kurang mencukupi, dalam upaya meningkatkan *tax ratio*, yang saat ini masih sekitar 10,38%. Pajak merupakan instrumen kebijakan → social, political, economic engineering dalam melihat kebijakan, secara komprehensif, holistik dan imparsial. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perpajakan yang cukup akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Oleh karenanya,

pada saat ini SDM bidang perpajakan sangat dibutuhkan, seperti Staf pajak perusahaan, konsultan pajak, pegawai PNS Pusat/Daerah, dosen di perguruan tinggi, Lembaga riset/LSM di bidang pajak, dan Lembaga lainnya. Kebutuhan yang tinggi di bidang perpajakan, belum diimbangi dengan ketersediaan SDM bidang perpajakan. Jika kita lihat jumlah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program perpajakan, baru sekitar 5 Perguruan Tinggi. Rata-rata mereka memiliki mahasiswa program perpajakan tidak lebih dari 1000 mahasiswa, yang terdiri dari jenjang D-1 sampai dengan D-4/S1. Artinya bahwa, masih banyak diperlukan lulusan Perpajakan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja.

Saat ini Universitas Terbuka (UT) sudah memiliki Prodi D-III Perpajakan, dengan jumlah mahasiswa pada masa registrasi 2022.2 sekitar 5.263 mahasiswa aktif. Mereka banyak yang akan menyelesaikan studinya pada 2 – 3 semester yang akan datang dan membutuhkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk meningkatkan karir. Oleh karenanya, peluang pasar dari lulusan program studi D-III Perpajakan FHISIP-UT sangat besar, di samping mahasiswa yang baru akan masuk S-1 Perpajakan.

Atas dasar uraian di atas maka FHISIP-UT menganggap penting dan perlu merencanakan pembukaan Prodi S-1 Perpajakan - FHISIP-UT.

B. Aspek Pasar

Berdasarkan hasil studi banding yang telah dilakukan, perguruan tinggi yang menyelenggarakan Program Studi Perpajakan di Indonesia dengan jenjang D-1 sampai dengan D-4 sekitar 62 Perguruan Tinggi (PT). Sedangkan Program Studi yang memiliki S-1 Perpajakan berjumlah 4 PT. Rata-rata mereka memiliki mahasiswa kurang dari 1000 mahasiswa kecuali Institut STIAM (7634).

Tabel 2. Jumlah mahasiswa Prodi S1 dan D4 Perpajakan dari PT lain sebagai berikut.

No	Nama Institusi	Tahun Ajar	
		Jumlah Mahasiswa Ganjil 2021	Jumlah Mahasiswa Genap 2021
1	Universitas Indonesia (S1)	420	387
2	Universitas Padjadjaran (D4)	382	318
3	Universitas Brawijaya (S1)	868	841
4	UNAKI (S1)	123	118

Sumber : <https://pdikti.kemdikbud.go.id/>

Tabel di atas menunjukkan bahwa perguruan tinggi besar yang menyelenggarakan program S1/D4 Perpajakan, jumlah mahasiswanya kurang dari 1000 orang. Hanya Universitas Brawijaya (UB) yang memiliki jumlah mahasiswa mendekati 1000, yaitu 868 pada semester 2021 ganjil, dan 841 mahasiswa pada semester 2021 genap.

Hasil studi banding ke beberapa perguruan tinggi yang memiliki program S1/D4 Perpajakan adalah sebagai berikut.

a. Studi banding ke Universitas Brawijaya (UB) Malang. UB mempunyai program studi D-III dan S1 Administrasi Perpajakan, di bawah Fakultas Ilmu Administrasi (FIA). Berdasarkan survei yang dilakukan oleh pihak Prodi terhadap lulusan, sebagian besar lulusan bekerja di sektor swasta, sektor publik dan konsultan pajak. Hal ini sebagai pertimbangan dalam penyusunan kurikulum Prodi S-1 Administrasi Perpajakan. Dan karena Prodi S-1 Administrasi Perpajakan di bawah FIA, maka struktur kurikulumnya terdiri dari bidang bisnis, dan tata kelola. Jumlah SKS yang harus diambil untuk S-1 Administrasi Perpajakan berjumlah 145 sks, yang akan ditempuh selama 8 semester. Struktur kurikulum terdiri dari:

- Matakuliah wajib umum : 8 sks
- Matakuliah wajib Universitas: 14 sks
- Matakuliah wajib Fakultas : 12 sks
- Matakuliah wajib Jurusan : 3 sks
- Matakuliah wajib Prodi : 75 sks
- Matakuliah Pilihan Prodi : 33 sks

Sumber: Workshop Review Kurikulum, 2022.

Adapun profil lulusan yang diharapkan untuk Prodi S1 Administrasi Perpajakan adalah menjadi:

1. Tax Supervisor
2. Public Tax Administrator
3. Tax Consultant
4. Tax Researcher
5. Academics
6. Entrepreneur

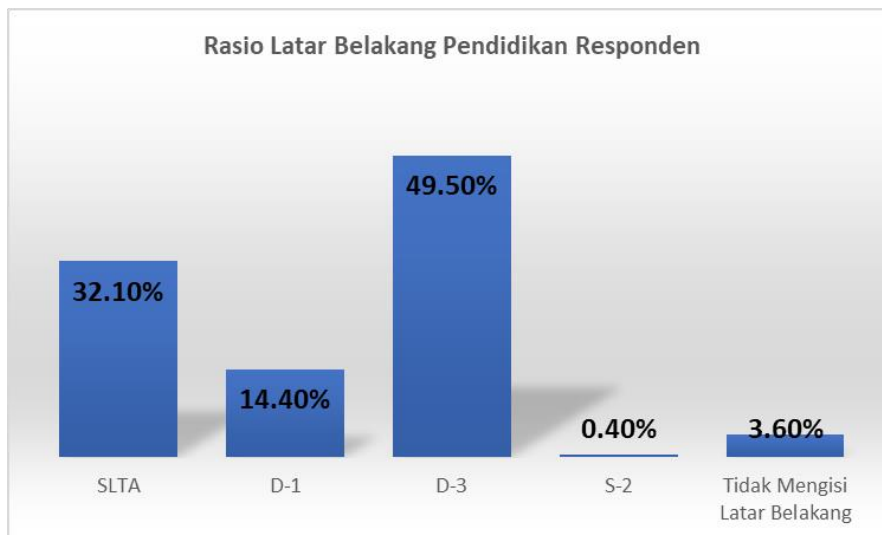
b. Selanjutnya studi banding ke Institut STIAM, dalam kunjungan kali ini tim pembukaan Prodi S-1 Perpajakan disambut langsung oleh Dekan, Kaprodi Perpajakan serta beberapa rekan

staf. Dimana hasil kunjungan tersebut memberikan gambaran terkait kurikulum mengenai prodi perpajakan yang digunakan oleh pihak STIAMI, ini menjadi salah satu referensi tim pembukaan Prodi S1 Perpajakan dalam menyusun kurikulum prodi S1 Perpajakan UT. Dan kekhasan yang dimiliki prodi Perpajakan STIAMI, ini menjadi catatan juga untuk tim pembukaan prodi S1 Perpajakan

Untuk memperdalam informasi terkait kebutuhan SDM bidang perpajakan, juga dilakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan pihak DJP. Hasil FGD dengan Direktur Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pihak DJP sangat terbuka dan mendukung atas pembukaan Program Studi S1 Perpajakan, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk melanjutkan kuliah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan berkaitan dengan pekerjaan di DJP. Hal ini sangat diperlukan oleh pihak DJP untuk meningkatkan kompetensi para pegawai. Pihak DJP akan melakukan eskalasi dalam meningkatkan jenjang Pendidikan pegawainya yang jumlahnya sekitar 15 ribu orang, dari jenjang D1 ke D3, dan dari D3 ke jenjang S1/D4 dalam waktu 3 tahun. Pihak DJP pun menyadari bahwa tingkat pendidikan untuk pegawai sangat penting karena berkaitan juga dengan pangkat dan golongan yang akan diterimanya. Dalam sistem pembelajaran pun, DJP telah memahami bahwa Universitas Terbuka sangat fleksibel, dimana proses pembelajaran dapat dilakukan dimana saja tanpa mengenal ruang dan waktu.

Selain melakukan kegiatan kunjungan dan FGD tersebut tim pembukaan prodi S-1 Perpajakan juga melakukan survei sesuai dengan identifikasi dan penaksiran permintaan pembukaan program S1 Perpajakan. Identifikasi dan penaksiran permintaan adalah suatu proses pengamatan dan penaksiran suatu permintaan produk barang atau jasa di pasaran. Penaksiran permintaan itu sendiri adalah proses menemukan nilai-nilai koefisien dari fungsi permintaan suatu produk. Tim melakukan survei kepada masyarakat dengan menggunakan *accidental sampling* dan diperoleh sejumlah 521 responden melalui *google form*. Adapun responden terdiri dari lulusan SLTA, sebesar 32,1%, lulusan D-1 sebesar 14,4%, lulusan D3 sebesar 49,5% dan lulusan S-2 sebesar 0,4%. Dari responden yang mengisi kuesioner, 98,8% menyatakan berminat untuk mengambil program S1 Perpajakan UT.

Gambar 1. Alasan Responden Mengambil Kuliah Di UT



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa alasan masyarakat mau mengambil kuliah di Program Studi S1 Perpajakan adalah sebagian besar menyatakan bahwa kuliah di UT pengaturan waktu belajar lebih fleksibel sebesar 80,8%, dan biayanya relatif lebih murah sebesar 72,4%.

Universitas Terbuka memiliki peluang untuk bisa mengakomodir masyarakat yang ingin berkuliah di bidang perpajakan, serta mengakomodir lulusan D-III Perpajakan FHSIP-UT yang ingin melanjutkan studi ke S-1 Perpajakan dalam meningkatkan karier yang lebih tinggi, di samping mahasiswa baru yang akan masuk S1 Perpajakan.

Tabel 3. Perbandingan minat dan daya tampung S-1 Perpajakan di beberapa perguruan tinggi.

No	Nama Perguruan Tinggi	Nama Program Studi (S1)	Jumlah Pendaftar (Peminat)	Jumlah yang Diterima (Daya tampung)	Rasio (peminat : Daya Tampung)
1	Universitas AKI	Perpajakan	241	241	1 : 1
2	Universitas Brawijaya	<u>Perpajakan</u>	1.709	175	1 : 11
3	Universitas Indonesia	Ilmu Administrasi Fiskal	807	70	1 : 12
4	Institut STIAMI	Administrasi Publik Konsentrasi Administrasi Perpajakan	7.634	7.634	1 : 1

Sumber : forlap dikti dan google, diolah (2021).

Dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ada perbedaan minat antara PTN dengan PTS, dimana minat masyarakat cenderung lebih banyak memilih PTN, sedangkan daya tampung sangat terbatas. Institut STIAMI dapat menampung lebih dari 6.000 mahasiswa setiap semeternya karena mempunyai beberapa cabang di Jakarta dan sekitarnya. Dengan inilah pertimbangan Universitas Terbuka akan membuka Program Studi S1 Perpajakan, karena minat masyarakat terhadap PTN lebih banyak yang berbanding terbalik dengan jumlah kampus pajak di Indonesia yang masih sedikit. Keunggulan Universitas Terbuka antara lain merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang mempunyai cabang di seluruh Indonesia, diharapkan akan menjadi pilihan yang tepat untuk masyarakat umum melanjutkan Pendidikan S1nya ke Universitas Terbuka.

C. Estimasi Kebutuhan Pasar Kerja bidang Perpajakan.

Tabel 4.1. Estimasi Kebutuhan Minimal Terhadap Tenaga Perpajakan (S1) di Institusi Pemerintah.

NO	NAMA LEMBAGA	Jumlah Lembaga	Jumlah Kebutuhan Tiap Lembaga	Jumlah Kebutuhan
1	Departemen dan Non Departemen	50	2	100
2	Pemerintah Provinsi	38	2	76
3	Pemerintah Kota/ kabupaten	514	2	1.028
	Jumlah			1.204

Sumber: Estimasi Kebutuhan Minimal Terhadap Tenaga Perpajak (S1) di industri

Tabel 4.2. Estimasi Kebutuhan Minimal Terhadap Tenaga Perpajakan (S1) di BUMN, BUMD dan Perusahaan

NO	Keterangan	Jumlah	Kebutuhan tiap Lembaga	Total kebutuhan
1	Industri manufaktur skala besar dan menengah tahun 2022 (sumber: https://www.bps.go.id/publication/2022/09/30/cbc730b4a2e4ebc36749998c/direktori-industri-manufaktur-indonesia--2022.html#:~:text=Jumlah%20perusahaan%20industri%20manufaktur%20skala,29%20ribu%20usaha%20atau%20perusahaan.)	29.000	2	58.000
2	Jumlah BUMN Tahun 2021 (sumber: https://www.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5BkataKunci%5D=BUMD&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilan)	95	2	190
3	Jumlah BUMD Tahun 2021 (sumber: https://www.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5BkataKunci%5D=BUMD&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilan)	829	2	1.658
	J u m l a h			59.848

Kebutuhan tenaga di bidang perpajakan selain yang telah diuraikan pada tabel di atas, juga masih dibutuhkan pada instansi/lembaga lainnya seperti kantor konsultan pajak, lembaga riset, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

D. Strategi Pemasaran

Dalam menentukan strategi pemasaran, dilakukan analisis Segmentasi Pasar, Target Pasar, dan Positioning Produk (STP)

1. Segmentasi Pasar (*Market Segmentation*)

Dalam studi kelayakan Prodi S-1 Perpajakan, dilakukan segmentasi pasar untuk menentukan target pasar yang akan menjadi fokus dari pasar prodi tersebut. Adapun segmentasi pasar yang dilakukan hanya berdasarkan faktor demografis, khususnya pada jenjang Pendidikan dan status pekerjaan. Pada jenjang Pendidikan, terbagi atas:

- a. Jenjang Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)
- b. Jenjang Pendidikan Tingkat Lanjut (Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana).
- c. Lainnya.

Sedangkan pada status pekerjaan, terbagi ke dalam:

- a. Bekerja, dan
- b. Tidak bekerja

2. Target Pasar (*Market Targeting*)

Secara umum pengertian menetapkan pasar sasaran adalah mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Berdasarkan hasil wawancara dan studi banding, dapat disimpulkan bahwa target pasar Prodi S1 Perpajakan adalah dari jenjang Pendidikan SLTA baik dari SMA, SMK, Madrasah, maupun dari lulusan tingkat diploma, dengan status mereka yang telah bekerja. Hal ini dikarenakan berdasarkan data mahasiswa D3 Perpajakan FHSIP UT, sebagian besar mahasiswanya adalah yang sudah bekerja. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan, Prodi S1 Perpajakan juga diminati oleh lulusan SLTA yang belum bekerja.

3. Positioning Produk (*Product Positioning*)

Menentukan posisi yang kompetitif untuk Program Studi S1 Perpajakan pada suatu pasar. Tujuannya adalah untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing Program Studi S1 Perpajakan yang dihasilkan ke dalam benak calon mahasiswa. Positioning Prodi S1 Perpajakan adalah yang menghasilkan lulusan profesional di bidang digitalisasi sistem pajak dan kebijakan perpajakan yang mampu beradaptasi terhadap perubahan.

E. Visi

Menjadi Program Studi S1 Perpajakan yang berkualitas di bidang digitalisasi sistem pajak dan kebijakan perpajakan, melalui penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh (PTTJJ).

Digitalization of Tax System (MK: Lab Perpajakan, Lab Perpajakan Lanjutan, Laboratorium Pengantar Akuntansi, Sistem informasi Akuntansi, Aplikasi Komputer Akuntansi, dan Digitalisasi Sistem Pajak).

Kebijakan Perpajakan tercermin dalam Mata Kuliah yang berhubungan dengan pajak seperti: Kebijakan Perpajakan, Perencanaan Perpajakan, Hukum Pajak, Tata Cara Pelaksanaan Perpajakan.

F. Misi

Misi Program Studi S-1 Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan S-1 Perpajakan bagi masyarakat melalui PTTJJ.
2. Menyelenggarakan penelitian dan mendiseminasikan hasil penelitian bidang perpajakan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang Perpajakan yang inklusif.
4. Menyelenggarakan program studi S-1 Perpajakan yang lulusannya mempunyai keahlian di bidang digitalisasi sistem pajak dan kebijakan perpajakan serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi.

G. Tujuan

Program Studi S1 Perpajakan bertujuan

1. Terciptanya penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh yang senantiasa relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan perpajakan di Indonesia yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Menghasilkan sarjana Perpajakan yang mampu melakukan riset dan inovasi di bidang perpajakan.
3. Terwujudnya karya pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran Perpajakan dalam menunjang pembangunan nasional.
4. Menghasilkan sarjana Perpajakan yang berkualitas, profesional, memiliki integritas, dan mampu bersaing dalam perkembangan teknologi informasi.

5. Terjalannya kerja sama yang efektif dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pengembangan penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang perpajakan.

H. Sasaran

Target sasaran yang utama dari Prodi S1 Perpajakan adalah masyarakat yang telah lulusan Pendidikan SLTA, baik dari SMA, SMK, Madrasah, maupun dari lulusan tingkat diploma, dengan status mereka yang telah bekerja. Hal ini dikarenakan berdasarkan data mahasiswa D3 Perpajakan FHSIP UT, sebagian besar mahasiswanya adalah yang sudah bekerja. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan, Prodi S1 Perpajakan juga diminati oleh lulusan SLTA yang belum bekerja.

I. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu:

1. Berpikir kritis dalam konteks pengambilan keputusan perpajakan. (KU).
2. Menguasai konsep dan teori perpajakan secara umum, hukum pajak, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah, pajak karbon, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan bea materai, pajak daerah dan retribusi daerah, kepabeanan dan cukai, perpajakan internasional, dan transfer pricing. (P1).
3. Menguasai konsep dan teori manajemen perpajakan yang mendukung proses pembuatan keputusan, prosedur, metode, teknik analisis laporan keuangan & interpretasi. (P2)
4. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang perpajakan secara mandiri. (S).
5. Kemampuan memecahkan masalah dan/atau pekerjaan di bidang perpajakan pada organisasi publik, perusahaan (entitas bisnis) jasa, dagang, dan/atau organisasi berskala nasional maupun global. (KK3).

Kurikulum Program Studi S1 Perpajakan dirancang agar dapat ditempuh mahasiswa dalam waktu kurang lebih delapan semester. Kurikulum tersebut dibuat dalam bentuk paket arahan semester. Capaian pembelajaran S1 Perpajakan selain sikap dan tata nilai serta keterampilan umum yang telah disinggung pada pendahuluan, juga meliputi keterampilan khusus dan penguasaan pengetahuan sebagai berikut.

J. Keterampilan Khusus

1. Kemampuan menerapkan dalam hal Perencanaan Pajak (*Tax Planning*), Hukum Pajak, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, pajak karbon, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan bea materai, pajak daerah dan retribusi daerah, kepabeanan dan cukai, perpajakan internasional, dan transfer pricing.
2. Kemampuan menerapkan konsep dan teori manajemen perpajakan yang mendukung proses pembuatan keputusan, serta mampu menerapkan konsep, teori, prosedur, metode, teknik analisis laporan keuangan & interpretasi, etika perpajakan dalam melakukan pekerjaan di bidang perpajakan pada organisasi publik, perusahaan (entitas bisnis) jasa, dagang, dan/atau organisasi berskala nasional maupun global.
3. Kemampuan memecahkan masalah dan/atau pekerjaan di bidang perpajakan pada organisasi publik, perusahaan (entitas bisnis) jasa, dagang, dan/atau organisasi berskala nasional maupun global.
4. Kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang pengembangan profesinya.
5. Kemampuan menguasai perkembangan peraturan perpajakan yang terbaru, sehingga dapat menerapkan semua aturan dan tata cara dalam perpajakan.

K. Penguasaan Pengetahuan

1. Menguasai konsep dan teori perpajakan secara umum, hukum pajak, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah, pajak karbon, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan bea materai, pajak daerah dan retribusi daerah, kepabeanan dan cukai, perpajakan internasional, dan transfer pricing.
2. Menguasai konsep dan teori manajemen perpajakan, termasuk Perencanaan Pajak (*Tax Planning*), yang mendukung proses pembuatan keputusan, prosedur, metode, teknik analisis laporan keuangan & interpretasi.

L. Spesifikasi Program

Mahasiswa baru Program Studi S1 Perpajakan FHSIP UT, diwajibkan mengikuti kegiatan Orientasi Mahasiswa Baru (OSMB) dan Pelatihan Keterampilan Belajar Jarak Jauh (PKBJJ). OSMB bertujuan membangun kesiapan, kesanggupan, dan keberhasilan belajar mahasiswa dalam sistem Pendidikan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh (PTTJJ), melalui pemahaman yang benar tentang konsep dan sistem Pendidikan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh (PTTJJ),

kedudukan Universitas Terbuka (UT) dalam sistem pendidikan tinggi nasional, serta sistem dan strategi belajar di UT.

Melalui OSMB, mahasiswa baru akan memperoleh pemahaman komprehensif tentang hakikat PTTJJ dan kaitannya dalam sistem pendidikan nasional, kelembagaan dan keorganisasian UT, sistem pembelajaran di UT (mulai registrasi, perolehan bahan ajar, tutorial, praktik/praktikum, evaluasi hasil belajar dan tugas akhir program, hingga sertifikasi, berikut layanan dan fasilitas pendukung belajar lainnya), serta strategi belajar di UT melalui metode eksplanasi, demonstrasi, simulasi, dan/atau kerja kelompok.

Pelatihan Keterampilan Belajar Jarak Jauh (PKBJJ) bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman dan keterampilan belajar efektif dalam sistem pendidikan jarak jauh di UT agar mereka memiliki kesiapan, kepercayaan diri, dan keberhasilan dalam menyelesaikan studinya dengan efektif dan hasil yang baik. Pelatihan PKBJJ ini membekali mahasiswa dengan wawasan, sikap, dan keterampilan belajar mandiri dengan substansi berupa perencanaan waktu belajar, penerapan strategi belajar efektif (membaca dan merekam hasil baca), serta pengoperasian dan pemanfaatan komputer dan internet untuk kepentingan belajar, khususnya melalui sumber dan layanan belajar *online* yang disediakan UT.

Materi utama yang menjadi pegangan mahasiswa Program S1 Perpajakan adalah Buku Materi Pokok (BMP), dalam bentuk cetak (*printed*) maupun dalam bentuk digital. BMP disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang benar dan sistematis, sehingga memudahkan mahasiswa dalam memahami esensi dari materinya. BMP ditulis oleh pakar di bidangnya yang relevan, baik dari akademisi maupun praktisi yang memenuhi kualifikasi yang ditentukan oleh UT. Sumber belajar lainnya juga disediakan melalui Open Education Resources (OER) sebagai materi pengayaan bagi mahasiswa yang dapat diakses melalui internet.

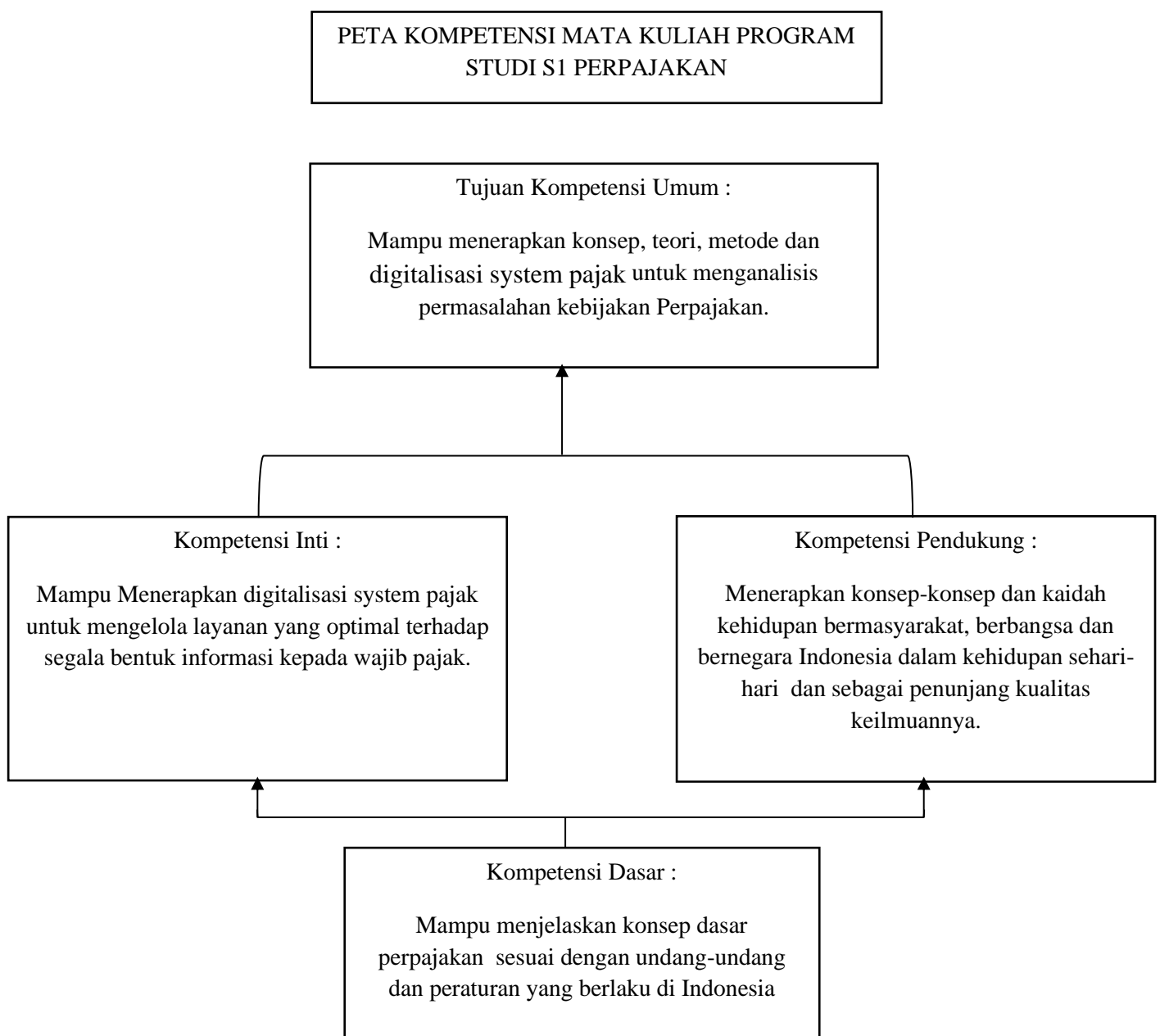
Program S1 Perpajakan Universitas Terbuka bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan tinggi jarak jauh yang senantiasa relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan perpajakan di Indonesia yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang berkualitas. Program S1 Perpajakan ini mempunyai tujuan untuk dapat menghasilkan lulusan yang handal dalam bidang perpajakan. Menjalinkan kerja sama yang efektif dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pengembangan penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang perpajakan.

BAB II KURIKULUM

A. Road Map Keilmuan Dan Keahlian

Program Studi S1 Perpajakan yang akan dibuka oleh FHSIP_UT didasarkan pada kebutuhan pasar. Sehingga kurikulumnya juga didesain berdasarkan kebutuhan pasar. Program S1 Perpajakan FHSIP UT akan fokus pada manajemen Perpajakan, yang meliputi Perencanaan Perpajakan, Kebijakan Perpajakan, pengawasan perpajakan dan hukum perpajakan.

B. Peta Kompetensi Dan Rancangan Kurikulum Kompetensi Utama Dan Kompetensi Pendukung



C. Struktur Kurikulum

Kurikulum Program Studi S1 perpajakan terdiri dari mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Jumlah SKS PS minimum untuk kelulusan Program S1 Perpajakan sebanyak 144 sks yang terlihat pada table berikut:

Tabel 5. Satuan Kredit Semester Program Studi S1 Perpajakan

Jenis Mata Kuliah	MK	SKS
Mata Kuliah Umum	7	21
Mata Kuliah Pajak	18	52
Mata Kuliah Non Pajak	20	60
Mata Kuliah Pilihan	3	3
Mata Skripsi, KKN, dan Magang	3	8
Jumlah Total	51	144

Struktur Kurikulum Program S1 Perpajakan.

Tabel 6. Pemetaan Mata Kuliah S1 Perpajakan Per Semester

NO	MATA KULIAH		SKS	JU
	KODE MK	NAMA		
Semester 1 (sikap, penguasaan pengetahuan)				
1	MKWU4108	Bahasa Indonesia	3	
2	MKWU4109	Pendidikan Kewarganegaraan	3	
3	Pilih Salah Satu Sesuai Data Pribadi		3	
	MKWU4101	Pendidikan Agama Islam		
	MKWU4103	Pendidikan Agama Kristen		
	MKWU4102	Pendidikan Agama Katholik		
	MKWU4105	Pendidikan Agama Hindu		
	MKWU4104	Pendidikan Agama Budha		
	MKWU4107	Pendidikan Agama Khonghucu		
4	ISIP4112	Pengantar Ilmu Ekonomi	3	
5	ISIP4130	Pengantar Ilmu Hukum	4	
	Total SKS		16	
NO	MATA KULIAH		SKS	JU
	KODE MK	NAMA		

Semester 2 (sikap, pengetahuan, Keterampilan umum)				
1	MKWU4110	Pancasila	3	
2	DTAX3101	Pengantar Ilmu Administrasi	4	
3	EKMA4115	Pengantar Akuntansi	4	
4	MKWI4201	Bahasa Inggris	3	
5	EKMA4316	Hukum Bisnis	2	
6	DTAX3102	Tata Cara Pelaksanaan Perpajakan	3	
Total SKS			19	
MATA KULIAH				
NO	KODE MK	NAMA	SKS	JU
Semester 3 (mampu menghitung Pajak Penghasilan Orang Pribadi)				
1	DTAX3103	Dasar-Dasar Perpajakan	3	
2	DTAX3104	Pajak Penghasilan Orang Pribadi	3	
3	HKUM4407	Hukum Pajak dan Acara Perpajakan	3	
4	ADBI4335	Akuntansi Menengah	3	
5	MKWI4202	Belajar di Era Digital	3	
6	EKSI4101	Laboratorium Pengantar Akuntansi	2	
Total SKS			17	
MATA KULIAH				
NO	KODE MK	NAMA	SKS	JU
Semester 4 (mampu menghitung Pajak Daerah, Pajak Pusat dan Pajak Internasional)				
1	MKWI4203	Kewirausahaan di Era Digital	3	
2	DTAX3302	PPN dan PPnBM	4	
3	DTAX3202	Pajak Penghasilan Badan	3	
4	DTAX3304	Pajak Internasional	3	
5	DTAX3303	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	3	
6	STAX4201	Pengantar Komputer	3	
Total SKS			19	
MATA KULIAH				
NO	KODE MK	NAMA	SKS	JU
Semester 5 (mampu membuat laporan keuangan sederhana)				
1	ESPA4122	Matematika Ekonomi	3	
2	DTAX3204	Pembelanjaan	2	
3	DTAX3201	Auditing	3	
4	DTAX3205	Akuntansi Biaya	4	
5	STAX4301	Aplikasi Komputer Akuntansi	3	

6	DTAX3203	Pajak Bumi dan Bangunan	2	
7	ISIP4215	Pengantar Statistik Sosial	3	
Total SKS			20	
MATA KULIAH				
NO	MATA KULIAH		SKS	JU
	KODE MK	NAMA		
Semester 6 (mampu membuat analisis laporan keuangan)				
1	EKSI4312	Sistem Informasi Akuntansi	3	
2	DTAX3311	Audit Perpajakan	3	
3	DTAX3306	Etika Profesi Pajak	3	
4	SKOM4432	Komunikasi Bisnis	3	
5	ADBI4235	Kepabeanan dan Cukai	2	
6	ADBI4532	Analisis Laporan Keuangan	3	
7	STAX4302	Kebijakan Fiskal dan Moneter	3	
Total SKS			20	
MATA KULIAH				
NO	MATA KULIAH		SKS	JU
	KODE MK	NAMA		
Semester 7 (mampu mengimplementasikan kebijakan perpajakan)				
1	STAX4401	Lab Perpajakan	2	
2	STAX4402	Transformasi Bisnis Perpajakan	3	
3	STAX4403	Metode Penelitian Perpajakan	3	
4	DTAX3312	Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak	3	
5	DTAX3313	Manajemen Perpajakan	3	
6	STAX4404	Kebijakan Perpajakan (Tax Policy)	3	
7	MKKI4301	Pemberdayaan Masyarakat (KKN)	2	
Total SKS			19	
MATA KULIAH				
NO	MATA KULIAH		SKS	JU
	KODE MK	NAMA		
Semester 8 (mampu menyelesaikan tugas akhir studi)				
1		Karya Ilmiah		
2	STAX4405	Lab. Perpajakan lanjutan	2	
3	STAX4406	Penyelesaian Sengketa Alternatif (<i>Alternative Dispute Resolution</i>)	3	
4	STAX4407	Tugas Akhir (Projek)	6	
Mata Kuliah Pilihan/Pilih Salah Satu				
5	DTAX3314	Studi Kasus Perpajakan	3	

	STAX4408	Peradilan Pajak		
	STAX4409	Transfer Pricing		
	Total SKS		14	

BAB III SUMBER DAYA

A. Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan sebuah Program Studi sudah pasti membutuhkan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang memadai, baik dosen maupun tenaga kependidikan (tendik). Mengacu kepada Permenristekdikti No. 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, pada Pasal 7 ayat 2 bagian (b) disebutkan bahwa jumlah minimum dosen yang akan mengampu program studi sebanyak 5 (lima) orang dan minimal 3 (tiga) orang diantaranya adalah dosen tetap. Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.

Selain dosen, dalam penyelenggaraan program studi di UT juga dibutuhkan tendik yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Menurut hemat kami dalam satu prodi dibutuhkan dua orang tendik, dengan kompetensi satu orang di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan satu lagi dengan keahlian di bidang administrasi umum. Hal ini mengingat load pekerjaan yang tinggi di UT hampir semua pekerjaan menggunakan aplikasi.

1. Dosen Tetap Prodi S-1 Perpajakan

Berdasarkan data yang ada saat ini, jumlah Dosen Tetap yang terlibat dalam pengelolaan Program studi S-1 Perpajakan FHSIP-UT, adalah sebanyak 12 (dua belas) orang, termasuk Kaprodi. Dari 12 dosen tersebut, dua orang diantaranya diperbantukan pada UT Daerah, yaitu satu di UT Daerah Jakarta dan satu lagi di UT Daerah Surabaya. Dengan demikian, jumlah dosen yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan Prodi S-1 Perpajakan sebanyak 10 (sepuluh) orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. Dosen Tetap Prodi S-1 Perpajakan

No	Nama Dosen	Pendidikan Terakhir	Jabatan Fungsional	Kompetensi
1.	Drs. Jasrial, M.Si	S2	Lektor	Manajemen/ Keuangan
2.	Dr. Agus Santosa, MM	S3	Lektor Kepala	Adm. Bisnis
3.	Drs. Syarif Fadillah, M.Si.	S2	Lektor	Adm. Bisnis
4.	Dr. Muhtarom, SE., MM.	S3	Lektor	Akuntansi
5.	Dedy Juniadi, S.Kom., MA.	S2	Asisten Ahli	Perpajakan
6.	Syafiqoh Nurhayati, SE.Sy., MA.	S2	Asisten Ahli	Perpajakan
7.	Ridha Azka Raga, SE., M.Ak	S2	Asisten Ahli	Akuntansi
8.	Jufri Yandes, SAB., M.Si.	S2	Asisten Ahli	Adm. Bisnis
9.	Destiana, SAB., MAB.	S2	Asisten Ahli	Adm. Bisnis

10.	Husna Putri Pertiwi, SST., MBA	S2	Asisten Ahli	Adm. Bisnis
11.	M. Firman Karim, S.Sos., M.Si.	S2	Lektor	Adm. Bisnis
12.	Berlina Hidayati, S.Pd. M.Acc.	S2	Asisten Ahli	Akuntansi

2. Dosen Tidak Tetap Prodi Perpajakan

Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada perguruan tinggi penyelenggara program studi yang diberi tugas melaksanakan pembelajaran dalam bidang yang relevan dengan kompetensinya yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Dosen Tidak Tetap di UT adalah dosen-dosen pada perguruan tinggi mitra UT, baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS), yang terlibat dalam penulisan dan *review* Bahan Ajar (BA), Bahan Ujian (BU), tutorial (baik tutorial online, tatap muka, maupun tutorial Webinar), serta terlibat pula dalam kegiatan penelitian dan abdimas.

Berdasarkan data tahun 2022, jumlah Dosen Tidak Tetap yang membantu Prodi S-1 Perpajakan FHSIP-UT berjumlah lebih dari 10 orang yang terlibat dalam penulisan Buku Materi Pokok (BMP), yang berasal dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Brawijaya (UB), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta dari perguruan tinggi atau lembaga lainnya. Adapun latar belakang pendidikan dan kompetensi Dosen Tidak Tetap tersebut bervariasi, sesuai dengan kebutuhan Prodi.

3. Tenaga Kependidikan (Tendik) Prodi S-1 Perpajakan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Disebutkan bahwa tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melayani Program Studi pada program diploma atau program sarjana, dan 1 (satu) orang untuk melayani perpustakaan, dengan ketentuan antara lain paling rendah berijazah diploma tiga. Berdasarkan data yang ada saat ini Prodi S-1 Perpajakan belum memiliki tendik yang khusus melayani Prodi S-1 Perpajakan.

B. Perencanaan SDM Prodi S1 Perpajakan

1. Dosen Tetap

Berdasarkan data di atas secara kuantitas dosen yang ada Prodi D-III Perpajakan sudah mencukupi. Namun demikian dilihat dari latar belakang Pendidikan SDM yang ada masih belum memadai sehingga diperlukan penambahan dosen dengan kualifikasi Pendidikan S-2/S-3 Perpajakan dan Hukum Pajak.

2. Dosen Tidak Tetap

Berdasarkan data tahun 2023.1 jumlah dosen tidak tetap (Tutor) Prodi D-III Perpajakan sebanyak 148 orang, dan penulis Buku Materi Pokok (BMP) sebanyak 31 orang. Perekrutan dosen tidak tetap akan

dilakukan setiap semester sebelum kegiatan tutorial dimulai. Untuk mengantisipasi penambahan jumlah mahasiswa dan jumlah mata kuliah yang ditawarkan prodi akan melakukan rekrutmen dosen tidak tetap kurang lebih 50% dari yang sudah ada.

3. Tenaga Kependidikan (Tendik)

Merujuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta bahwa setiap Prodi harus didukung oleh 2 (dua) orang tendik, maka Prodi S1 Perpajakan memerlukan minimal 1 (satu) orang Tendik, dengan kualifikasi pendidikan D-III dengan kompetensi dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau administrasi umum.

C. Rencana Pengembangan SDM Prodi Perpajakan

Sampai tahun 2022 ini Dosen Tetap pada Prodi D-III Perpajakan hanya 1 (satu) yang memiliki kualifikasi pendidikan S-3. Jika kelak Prodi S-1 dibuka, maka tidak ada Dosen Tetap yang memiliki kualifikasi pendidikan S-3 pada Prodi S-1 Perpajakan. Oleh karena itu dalam upaya memenuhi persyaratan komposisi Dosen Tetap dengan pendidikan S-3, Dekan FHISIP-UT telah merencanakan untuk menugaskan Dosen Tetap pada Prodi Perpajakan untuk studi lanjut pada jenjang pendidikan S3 secara bertahap mulai tahun 2023.

Selain pendidikan formal, Dosen Tetap Prodi Perpajakan juga direncanakan mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan, seperti *Brevet A/B/C* dan kompetensi lainnya. Di samping itu dosen tetap juga didorong untuk mengikuti seminar-seminar di bidang Perpajakan serta aktif baik yang diselenggarakan oleh IFTAA (*Indonesian Fiscal and Tax Administration Association*), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maupun lembaga lainnya.

Tabel 7. Data dosen tetap Prodi S1 Perpajakan

No	Nama Dosen Tetap ⁽¹⁾	NIDN ⁽²⁾	Pusat/UT Daerah ⁽³⁾	Jabatan Akademik	Jenjang Pendidikan Terakhir dan Asal Universitas ⁽⁴⁾	Bidang Tugas/Fungsi ⁽⁵⁾			Nama Mata Kuliah yang Diampu	Judul Bahan Belajar/ Soal yang Dikembangkan/ Ditelaah
						A	B	C		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)
1	Drs. Jasrial, M.Si.		Pusat	Lektor	S2, Manajemen/Keuangan UNPAD	√	√	√	1. Pembelanjaan, Auditing, Kebijakan Fiskal dan Moneter	Pembelanjaan, Auditing, Kebijakan Fiskal dan Moneter
2	Dr. Agus Santosa, M.M.		Pusat	Lektor Kepala	S3 Administrasi Bisnis/UNPAD	√	√	√	2. Metode Penelitian Perpajakan	Metode Penelitian Perpajakan
3	Drs. Syarif Fadillah, M.Si.		Pusat	Lektor	S2 Administrasi Bisnis/UI	√	√	√	3. Pengantar Ilmu Administrasi	Pengantar Ilmu Administrasi
4	Dr. Muhtarom, S.E., M.M.		Pusat	Lektor	S3 Pemerintahan/UNPAD	√	√	√	4. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Lab Pajak Lanjutan, Kebijakan Perpajakan	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Lab Pajak Lanjutan, Kebijakan Perpajakan
5	Dedy Juniadi, S.Kom., M.A.		Pusat	Asisten Ahli	S2 Administrasi Pajak/Institut STIAMI	√	√	√	5. Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Peradilan Pajak,	Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Studi Kasus Perpajakan, Peradilan Pajak
6	Syafiqoh Nurhayati, SE.Sy., M.A.		Pusat	Asisten Ahli	S2 Administrasi Pajak/Institut STIAMI	√	√	√	6. Pajak Penghasilan Badan, , Tax Planning, PPN dan PPnBM	Pajak Penghasilan Badan, , Tax Planning, PPN dan PPnBM
7	Ridha Azka Raga, S.E., M.Ak		Pusat	Asisten Ahli	S2 Akuntansi/UNPAD	√	√	√	Pengantar Aplikasi Komputer, Akuntansi Biaya, Audit Perpajakan,	Pengantar Aplikasi Komputer, Akuntansi Biaya, Audit Perpajakan
8	Jufri Yandes, S.A.B., M.Si.		Pusat	Asisten Ahli	S2 Ilmu Administrasi/UNILA	√	√	√	7. Pajak Internasional, Transfer Pricing	Pajak Internasional, Transfer Pricing

9	Destiana, S.A.B., M.A.B.		Pusat	Asisten Ahli	S2 Administrasi Bisnis/ UB	√	√	√	8. Dasar-dasar Perpajakan, Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak	Dasar-dasar Perpajakan, Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak
10	Husna Putri Pertiwi, S.ST., M.B.A.		Pusat	Asisten Ahli	S2 Administrasi Bisnis/ NTUST	√	√	√	9. Tata Cara Pelaksanaan Perpajakan, Digitilisasi Sistem Pajak, Lab Perpajakan	Tata Cara Pelaksanaan Perpajakan, Digitilisasi Sistem Pajak, Lab Perpajakan
11	M. Firman Karim, S.Sos., M.Si.		UT Daerah	Lektor	S2 Administrasi Bisnis/UI	√	√	√	10. Pajak Bumi dan Bangunan, Etika Profesi Perpajakan	Pajak Bumi dan Bangunan, Etika Profesi Perpajakan
12	Berlina Hidayati, S.Pd., M.Acc.		UT Daerah	Asisten Ahli	S2 Akuntansi/ UGM	√	√	√	11. Akuntansi Perpajakan, Aplikasi Komputer Akuntansi	Akuntansi Perpajakan, Aplikasi Komputer Akuntansi
13	Aji Suryo Antoro		Pusat	Asisten Ahli	S2 Ilmu Administrasi/ UI	√	√	√	12. Alternative Dispute, Studi Kasus Perpajakan,	Alternative Dispute, Studi Kasus Perpajakan,

Tabel 8. Data dosen yang mempunyai keahlian tambahan yang menunjang PS

No	Nama Dosen Tetap ⁽¹⁾	NIDN ⁽²⁾	Pusat PTTJJ/ Unit PTTJJ ⁽³⁾	Jabatan Akademik	Keahlian Tambahan Yang Menunjang PS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Drs. Jasrial, M.Si.		Pusat	Lektor	Auditor SPI, SIMINTAS
2	Dr. Agus Santosa, M.M.		Pusat	Lektor Kepala	Auditor Manajemen Mutu, Sertifikat Internasional Quantitative Research, Qualitative Research, Mix Method.
3	Drs. Syarif Fadillah, M.Si.		Pusat	Lektor	Auditor SPI

4	Dr. Muhtarom, S.E., M.M.		Pusat	Lektor	Auditor SPI, Sertifikat Brevet C, CRM, dan seterusnya
5	Dedy Juniadi, S.Kom., M.A.		Pusat	Asisten Ahli	Auditor SPI, Sertifikat Brevet C
6	Syafiqoh Nurhayati, SE.Sy., M.A.		Pusat	Asisten Ahli	Auditor SPI, Sertifikat Brevet C
7	Ridha Azka Raga, S.E., M.Ak		Pusat	Asisten Ahli	Auditor SPI
8	Jufri Yandes, S.A.B., M.Si.		Pusat	Asisten Ahli	-
9	Destiana, S.A.B., M.A.B.		Pusat	Asisten Ahli	
10	Husna Putri Pertiwi, S.ST., M.B.A.		Pusat	Asisten Ahli	-
11	M. Firman Karim, S.Sos., M.Si.		UT Daerah	Lektor	-
12	Berlina Hidayati, S.Pd., M.Acc.		UT Daerah	Asisten Ahli	Auditor Manajemen Mutu, Sertifikat Internasional Quantitative Research, Qualitative Research, Mix Method.
13	Aji Suryo Antoro		Pusat	Asisten Ahli	BKP (Bersertifikat Konsultan Pajak)

Rencana Kegiatan 2023 s.d 2024.2

- 1) Program Studi S1 Perpajakan akan dibuka pada 2024.2
- 2) Prodi S1 Perpajakan akan ditawarkan diseluruh UT Daerah.
- 3) Menyelesaikan penulisan BMP untuk seluruh matakuliah yang belum tersedia.
- 4) Mengembangkan Bahan Tutor untuk seluruh matakuliah
- 5) Penulisan soal TMK untuk seluruh matakuliah
- 6) Penulisan soal UAS dalam bentuk soal uraian maupun soal objektif
- 7) Mengembangkan Panduan dan Pedoman Praktik Kerja Perpajakan
- 8) Mengembangkan Website Prodi S1 Perpajakan

D. Kemitraan

Kemitraan Prodi S1 Perpajakan merupakan hal yang sangat penting, karena Prodi membutuhkan tenaga professional dari berbagai mitra dalam penulisan BMP, kegiatan tutorial, pembimbingan praktik Perpajakan, dan kegiatan lainnya. Adapun pihak-pihak yang direncanakan menjadi mitra antara lain:

- 1) Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dalam dan luar negeri.
- 2) Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI yang selama ini telah terjalin kerja sama dengan baik.
- 3) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
- 4) Kementerian dan Lembaga Tinggi Negara yang relevan
- 5) KADIN Pusat maupun daerah
- 6) Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/kota
- 7) Asosiasi Profesi Perpajakan atau konsultan pajak, seperti Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (PERTAPSI), Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan lembaga lainnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

- Berdasarkan hasil studi kelayakan diperoleh informasi bahwa tenaga perpajakan yang profesional pada jenjang S-1 masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Maka FHISIP UT mengembangkan program studi S-1 Perpajakan.
- Kurikulum S-1 Perpajakan telah disusun mengikuti kebutuhan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan mengacu kepada KKNI. Diharapkan lulusan memiliki keahlian dalam bidang digitalisasi sistem pajak dan kebijakan perpajakan.

B. SARAN

- Program S-1 Perpajakan FHISIP UT akan ditawarkan diseluruh UT Daerah pada tahun 2024.2.
- Perlu melakukan rekrutmen dosen tetap sebanyak 4 (empat) orang dan Tendik 1 (satu) orang untuk mendukung operasional program studi.